

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Netralitas Pejabat Daerah dan TNI/POLRI Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:136/PUU-XXII/2024)

Oleh

Lidia Herlin Nubatonis

NIM: 20310020

Pelanggaran pejabat daerah dan anggota TNI/Polri diatur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terjaminnya kepatuhan pejabat daerah maupun anggota TNI/Polri terhadap larangan yang diberikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Apa alasan pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188? 2.Apa alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Pemohon? 3. Apa alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188; 2) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi para Pemohon; 3. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Variabel bebas yaitu pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188; dan alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Pemohon dan alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Variabel terikat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 136/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, alasan pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188 adalah: 1). Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. 2). Pemohon memohon agar menambahkan frasa kalimat pejabat daerah dan TNI Polri dalam Pasal 188. 4). Menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum kepala daerah; 4). Melanggar prinsip moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. **Kedua**, Alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Pemohon adalah tidak ada urgensi dan relevansi untuk mendengarkan keterangan para pihak. **Ketiga**. Alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon karena pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya. Dari kesimpulan tersebut disarankan beberapa hal yaitu: **Pertama**, Bagi hakim Mahkamah Konstitusi agar terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi warga negara Indonesia; **Kedua**, DPR dan Pemerintah perlu perbaikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai hak masyarakat dalam negara demokrasi yang diselenggarakan secara jujur dan adil telah mencerminkan demokrasi dalam negara.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, Netralitas Pejabat daerah dan TNI/Polri*

ABSTRACT

Description of the Neutrality of Regional Officials and the Indonesian National Armed Forces/Indonesian National Police (TNI/POLRI) in Regional Head Elections (Study of Constitutional Court Decision Number: 136/PUU-XXII/2024)

By

Lidia Herlin Nubatonis

Student ID: 20310020

Violations by regional officials and members of the Indonesian National Armed Forces/Indonesian National Police (TNI/POLRI) are regulated in Article 71 of Law Number 10 of 2016. The failure to ensure compliance by regional officials and members of the TNI/Polri with the prohibitions imposed by criminal sanctions stipulated in Article 188 of Law Number 1 of 2015 contradicts Article 18 paragraph (4), Article 22E paragraph (1), and Article 28D paragraph 1 of the 1945 Constitution. The problems in this research are: 1. What are the reasons for the applicant's request for a judicial review of Article 188? 2. What are the reasons for the Constitutional Court's rejection of the applicant's provisional request? 3. What are the reasons for the Constitutional Court's granting of the applicant's request? The objectives of this study are to determine: 1. The reasons why the applicant filed a judicial review of Article 188; 2. The reasons why the Constitutional Court rejected the applicants' provisional request; and 3. The reasons why the Constitutional Court granted the applicants' request. This study is descriptive and uses normative legal research. The independent variables are the applicant's request for a judicial review of Article 188; the reasons why the Constitutional Court rejected the applicant's provisional request and the reasons why the Constitutional Court granted the applicant's request. The dependent variable is Constitutional Court Decision Number 136/PUU-XXII/2024.

The results of the study indicate that: First, the reasons why the applicant filed a judicial review of Article 188 are: 1). The applicant believes that his constitutional rights and/or authorities have been violated. 2). The applicant requests the addition of the phrase "regional officials and the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri)" to Article 188. 4). It creates uncertainty in law enforcement for regional heads; 4). It violates the principles of morality, rationality, and intolerable injustice. Second, the Constitutional Court's reason for rejecting the Petitioner's provisional request was the lack of urgency and relevance in hearing the parties' testimony. Third, the Constitutional Court granted the Petitioner's request because the Petitioner was able to prove his arguments.

Based on these conclusions, several recommendations are made: First, Constitutional Court judges should continue to improve their professionalism in providing justice, legal certainty, and benefits to Indonesian citizens. Second, the House of Representatives (DPR) and the Government need to improve their drafting of laws and regulations to provide justice and legal certainty regarding the rights of the people in a democratic state that is conducted honestly and fairly, reflecting democracy in the country.

Keywords: Constitutional Court, Regional Head Elections, Neutrality of Regional Officials and the Indonesian National Armed Forces (TNI/Polri).